

DIKLAT & ASPIRASI

Diklat Pemeriksaan Kas di Kas Daerah



Sebelum melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), para pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti pendidikan dan pelatihan pemeriksaan kas daerah. Diklat ini diselenggarakan oleh Subbagian Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 sampai dengan 23 Januari 2014.

Diklat ini dibuka oleh secara resmi oleh Kepala Sekretariat Perwakilan. Adapun pemateri dalam diklat ini adalah Mustamin selaku Ketua Tim Senior yang didampingi oleh Wahid Ikhsan Wahyudin selaku pemeriksa yang cukup berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan LKPD. Dalam pelaksanaan diklat selama tiga hari tersebut, peserta diberikan pemahaman mendasar dan penjelasan tentang kas daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan pemeriksaan atas kas daerah, para pemeriksa juga diberikan contoh kasus serta model pemecahannya. Selain itu pemateri juga memberikan metode dan tips dalam melakukan pemeriksaan atas kas daerah dengan menggunakan aplikasi komputer.

Dengan melaksanakan diklat ini diharapkan para pemeriksa dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pemeriksaan LKPD pada umumnya dan pemeriksaan kas daerah pada khususnya. Setelah seluruh rangkaian acara berakhir, diklat ditutup secara resmi oleh pemateri dan diakhiri dengan foto bersama seluruh peserta diklat.

Penyampaian Aspirasi dan Informasi PPM-SULTRA



Pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menerima penyampaian aspirasi dan informasi dari Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa Sulawesi Tenggara (PPM-Sultra). Penyampaian aspirasi dan informasi tersebut terkait dengan beberapa proyek pembangunan jalan di Kabupaten Muna yang dinilai tidak sesuai dengan kontrak dan diduga terjadi penyimpangan.

PPM-SULTRA berharap agar BPK melakukan audit atas penggunaan anggaran dalam pekerjaan pembangunan jalan tersebut. Menurut koordinator aksi PPM-Sultra, berdasarkan laporan masyarakat dan hasil pengecekan lapangan oleh PPM-Sultra, disinyalir terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh penyedia.

Penyampaian aspirasi dan informasi PPM-SULTRA diterima oleh Kasubbag Hukum dan Humas, Niniek Anjarwati di ruang media center. Kasubbag Hukum dan Humas menyampaikan bahwa aspirasi dan informasi yang disampaikan merupakan bentuk komunikasi dan sinergi

antara BPK dan masyarakat. Selain itu, informasi yang disampaikan akan menjadi informasi awal dalam pelaksanaan pemeriksaan di Kabupaten Muna untuk tahun anggaran yang bersangkutan

Mereka yang datang.....

 YUSFRIDAR dari Pwk Sumut ke Subaud Sultra I	 M. INDRASAKTI dari Pwk Kalteng ke Subbag Keuangan	 TAUFIKURRAHMAN dari Pwk Sumut ke Subaud Sultra II
--	---	--

 SUKMAINI dari Pwk Sulsel ke Subaud Sultra I	 HASANUDDIN dari Pwk NTT ke Subbag Umum
--	--

 SITTI RAHMAH dari Pwk Sulsel ke Subaud Sultra I	 ANWAR LUTFI dari AKN 7 ke Subaud Sultra II
--	--

Mereka yang pergi.....

Mereka yang sekolah.....

 NELSON HH SIREGAR dari Subaud Sultra II ke Pwk Jateng	 ENI SULISTIANI
--	--

Jim Redaksi

Pengarah
Nelson Ambarita
Penanggung Jawab
Erwin Djuty Prabowo
Pimpinan Redaksi
Niniek Anjarwati
Kontributor
Muhammad Lukman,
Arlinda M. Sholikhah, Pratomo
Satriyo Wibowo, Sukriadin,
Yudi Kurniawan.
Layout
M. Mahmudi
Website
kendari.bpk.go.id
Alamat
Jl. Sao-Sao No. 10 Kendari, Sulawesi
Tenggara
Telp. 0401-3129385
Fax 0401-3129441
Email: hukmasbpkri_sultra@yahoo.co.id

KABARANO

Edisi XVIII, Januari - April 2014

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Catatan Redaksi

Edisi pertama tahun 2014, KABARANO menyajikan berita tentang rangkaian kegiatan HUT BPK RI ke-67, termasuk diantaranya adalah upacara bendera, lomba-lomba dan family gathering di Pantai Puudonggala, Kabupaten Konawe Utara.

Disamping kegiatan HUT BPK, kegiatan lain selama caturwulan I tahun 2014 ini antara lain adalah kegiatan penandatanganan MoU dan Juknis Akses Data pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra, Diklat Pemeriksaan Kas di Kas Daerah, dan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan.

Redaksi berharap semoga KABARANO dapat memberikan informasi yang bermanfaat seputar kegiatan BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara. Salam sukses!

Redaksi

Edisi Kali Ini:

- 1 Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara secara online pada BPD Sultra
- 2 Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Tenggara // Penanaman Pohon oleh para Pejabat Struktural // Rakor Dalam Rangka Rekonsiliasi Pelaporan Data Realisasi APBD TA 2013 dan Pajak TA 2013
- 3 Rangkaian Kegiatan HUT BPK RI ke-67
- 4 Diklat Pemeriksaan Kas di Kas Daerah // Penyampaian Aspirasi PPM-SULTRA

Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara Secara Online pada BPD Sultra



Pada hari Senin tanggal 14 April 2014, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara Secara online pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tenggara, Nelson Ambarita, dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Nur Alam, para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara serta Direktur Utama BPD Sulawesi Tenggara, Khaerul Kemala Raden. Kegiatan ini disaksikan oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo, Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan, Tortama III, Rochmadi Saptogiri, Tortama VI, Syafrudin Mosii, serta para pejabat di lingkungan BPK, pemda, dan BPD Sulawesi Tenggara.

Pada kesempatan itu Gubernur Sulawesi Tenggara dalam sambutannya menjelaskan dengan penandatanganan kesepakatan ini merupakan bagian dari keputusan yang strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung sepenuhnya penandatanganan kesepakatan bersama ini dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Ketua BPK dalam sambutannya menilai penandatanganan kesepakatan ini sangat penting karena melalui kesepakatan bersama akan tercipta "e-audit financial tracking" yang akan memberikan manfaat bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara serta BPD Sulawesi Tenggara. Manfaat bagi pemda antara lain mencegah anomali/penyimpangan transaksi dan mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemda dimaksud. Bagi BPD, akses on-line dapat digunakan untuk mendorong pengembangan Cash Management System (CMS) yang terintegrasi dengan SIMDA pada pemda.

Lebih lanjut Ketua BPK menegaskan bahwa dengan e-audit termasuk akses on-line ini, pencegahan KKN dapat dilakukan secara sistemik karena pengelolaan keuangan negara "terpaksa patuh" secara sistem dengan adanya semacam CCTV transaksi kas. Selain peningkatan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan BPK, sistem on-line e-audit juga mampu meningkatkan penerimaan negara/daerah pada pemda tersebut. Beliau menambahkan, bahwa Presiden Republik Indonesia mendukung sepenuhnya langkah BPK dalam penerapan akses data transaksi kas pemerintah daerah secara online ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan negara/daerah.

Pada kesempatan tersebut sekaligus dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data (E-Audit) antara BPK dengan dua kabupaten pemekaran yaitu Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

PENYERAHAN LKPD

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Tenggara



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, pemerintah daerah se- Sulawesi Tenggara menyampaikan LKPD Tahun Anggaran 2013 kepada BPK.

Penyerahan LKPD pertama adalah LKPD Kabupaten Konawe Utara, yang disampaikan oleh Bupati Konawe Utara yang diterima oleh kepala sekretariat pada tanggal 24 Maret 2014. Kemudian berturut-turut diserahkan LKPD Kabupaten Konawe, LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan pada 26 Maret 2014. Pada kesempatan tersebut kepala perwakilan berkesempatan menerima penyerahan LKPD.

Tanggal 27 Maret 2014, dilaksanakan penyerahan LKPD Kabupaten Konawe Selatan, LKPD Kabupaten Bombana, yang dilaksanakan secara bersamaan dan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan. Sore harinya, Kepala Perwakilan menerima penyerahan LKPD secara serentak dari Kota Kendari, Kota Baubau, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Kolaka Utara. Tiga entitas terakhir yakni Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Wakatobi, menyerahkan LKPD kepada BPK pada tanggal 28 Maret dalam kesempatan yang terpisah dan masing-masing diterima oleh kepala sekretariat.

Dengan adanya penyerahan LKPD tersebut, maka BPK akan melakukan pemeriksaan yang hasilnya akan diserahkan kepada DPRD dan kepala daerah masing-masing dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

BPK GO GREEN

Penanaman Pohon oleh para Pejabat Struktural

Untuk mendukung gagasan Kepala Perwakilan yang menginginkan BPK yang lebih "go green", BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan acara penanaman pohon di lingkungan kantor pada tanggal 28 Januari 2014. Penanaman pohon tersebut dilaksanakan setelah upacara peringatan HUT BPK dilangsungkan, dengan maksud agar momen tersebut dapat diikuti oleh keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.



Penanaman pohon pertama dilakukan oleh kepala perwakilan dengan mengambil lokasi pada sisi bagian kanan gedung kantor. Dalam kesempatan tersebut kepala perwakilan berpesan agar pohon yang ditanam tersebut dapat dijaga dengan baik selain untuk menambah keindahan kantor juga sebagai kenangan kepada pejabat yang pernah mengabdikan di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya penanaman pohon dilakukan berturut-turut oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Kepala Sub Auditorat Sulawesi Tenggara I, Kepala Subbagian SDM, Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Hukum dan Humas, dan terakhir oleh Kepala Subbagian Sekretariat Kepala Perwakilan.

HUT BPK

Rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun BPK ke 67



Tanggal 1 Januari diperingati sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) BPK. Setiap tahunnya, BPK melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menyemarakkan peringatan HUT tersebut. Dalam rangka ikut berpartisipasi pada peringatan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan beberapa kegiatan diantaranya, kompetisi pertandingan olah raga, gerak jalan sehat, perlombaan tarik suara, family gathering, dan upacara bendera.

Peringatan HUT BPK ke-67 di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara diawali dengan pelaksanaan lomba-lomba, diantaranya lomba bulu tangkis, lomba tenis meja, lomba futsal, lomba bilyard. Selain itu diperlombakan pula lomba karaoke antar satuan kerja. Keluarga besar Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara juga melaksanakan jalan santai dengan rute jalan di sekitar kantor.

Untuk lebih mempererat rasa kekeluargaan, pada tanggal 11 Januari 2014 dilaksanakan acara family gathering di Pantai Puudonggala Kabupaten Konawe Utara yang diikuti oleh keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam acara ini diadakan lomba-lomba diantaranya, lomba tarik tambang, lomba

pesan berantai, lomba holahop berantai dan lomba mengeluarkan bola pingpong dari dalam galon yang dilubangi. Panitia juga melibatkan anak-anak dalam beberapa lomba, diantaranya lomba makan krupuk, lomba sendok kelereng, dan lomba mewarnai. Untuk membuat acara lebih meriah, panitia mengumumkan hasil polling atas beberapa kategori diantaranya pegawai tergalau, ternarsis, terimut, tersporty, dan teroyal. Menutup acara family gathering, panitia membagikan hadiah kepada peserta yang beruntung mendapatkan undian doorprize.

Puncak acara peringatan HUT BPK ke 67 dilaksanakan dengan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Januari 2014. Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan bertindak selaku Inspektur Upacara. Bertepatan dengan momen HUT BPK, pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah mengabdikan selama 10 dan 20 tahun mendapatkan penghargaan atas pengabdiannya sebagai PNS. Penghargaan tersebut diserahkan oleh inspektur upacara kepada pegawai yang bersangkutan. Hal yang baru pada peringatan HUT BPK kali ini adalah pemberian beasiswa kepada pelajar putra dan putri pegawai dan karyawan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemberian beasiswa ini diharapkan menjadi pemacu agar adik-adik pelajar semakin giat dalam belajar. Sesuai pelaksanaan upacara Peringatan HUT BPK, keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan acara syukuran. Acara ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian BPK, khususnya Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkup Sulawesi Tenggara. Dalam acara ini juga diselenggarakan teleconference dengan pimpinan BPK yang berada di kantor pusat, yang juga diikuti oleh seluruh perwakilan BPK.

Rakor Dalam Rangka Rekonsiliasi Pelaporan Data Realisasi APBD TA 2013 dan Pajak TA 2013



Dalam rangka memperoleh data yang valid mengenai realisasi APBD dan realisasi pembayaran pajak pada seluruh pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara (DJP Kanwil Sulselbarteng) bekerja sama dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Sulawesi Tenggara menggelar acara Rapat Koordinasi Dalam Rangka Rekonsiliasi Pelaporan Data Realisasi APBD TA 2013 dan Pajak TA 2013 yang berlangsung di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada 16 Januari 2014.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala BPKP Sulawesi Tenggara, Kepala Bidang Humas dan Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi DJP Kanwil Sulselbarteng, Kepala Biro Keuangan/DPPKAD/BPKAD pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara serta perwakilan dari inspektorat pemerintah daerah.

Agenda utama dalam acara tersebut adalah rekonsiliasi data antara DJP dengan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara terkait realisasi APBD dan pajak pada Tahun Anggaran 2013. Sebelum pelaksanaan rekonsiliasi data, terlebih dahulu Kepala Bidang Humas dan Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi DJP Kanwil Sulselbarteng menerangkan mengenai maksud dan tujuan serta teknis pelaksanaan rekonsiliasi data tersebut. Selain itu, untuk menampung masukan dan pertanyaan dari peserta rapat koordinasi, DJP mengadakan diskusi panel dengan moderator Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara.

